

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Studi Kasus pada Pengembangan Kawasan Situ Pulo, Bekasi

Pitri Yandri

STIE Manajemen Industri & Jasa Indonesia

Gd. Patrajasa Lt. 8, Room 808,

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34

Jakarta Selatan

Email: p.yandri@gmail.com

Abstract

In the era of autonomy, swamp (situ) is the one of property that could be managed by the local government in order to raise their revenues (PAD). However, in order to maximize its PAD, the decisions made by local governments usually faced with a complex situation. The research objective is to assess the perceptions and preferences of stakeholders that include the public, private sector and government towards the development of swamp. One of the eighteen swamps in Bekasi is "Situ Pulo" By using AHP obtained information that the most responsible party for the development of Situ Pulo is local government. Seeing this fact, the local government should be able to do development initiatives. However, the process of swamp development should depart from the aspirations of local communities.

Kata kunci: barang publik, *stakeholder*, pendapat ahli, hirarki

PENDAHULUAN

Era otonomi, terutama sejak di-undangkannya UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP. No. 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah, memberi kesempatan pada daerah untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang dimilikinya, termasuk sektor pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan obyek wisata telah menjadi kewenangan daerah (kabupaten/kota).

Pelimpahan kewenangan ini tentu lebih mendatangkan manfaat ketimbang dikelola oleh pemerintah pusat. Sebab menurut Juanda (2007), 4 (empat) dari 5 (lima) manfaat yang

diperoleh dari pelimpahan kewenangan ini adalah: (1) kemungkinan pengelolaan sumberdaya alam dengan prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan; (2) partisipasi masyarakat dan rasa memiliki dapat semakin meningkat; (3) efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya alam kemungkinan meningkat; dan (4) kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud.

Berangkat dari sejumlah regulasi itu, pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PAD tersebut, pemerintah daerah lalu dituntut memiliki

akurasi yang tinggi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Hal ini menjadi penting, mengingat kebijakan dan keputusan yang diambil tentu terkait dengan kepentingan publik. Sebab, kepentingan mendasar dalam kebijakan sektor publik terletak pada efektifitas rumusan kebijakan dan perbaikan aplikasinya.

Fungsi-fungsi utama kebijakan publik meliputi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik (*public good*) yang melibatkan proses pembagian penggunaan total sumber daya antara *private good*, *public good* dan *mix good* berdasarkan prinsip efisiensi. Fungsi distribusi berkaitan dengan penyesuaian distribusi pendapatan dan kesejahteraan berdasarkan prinsip *distributive justice*. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan kebijakan untuk mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, stabilitas harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang layak (Dwijowijoto, 2003).

Secara formal, alokasi *public good* yang optimal dapat diturunkan dari fungsi utilitas individu. Fungsi utilitas individu untuk *private good* y dan *public good* z adalah $U = u(y, z)$. Fungsi pajak adalah $t(z)$. Sehingga pendapatan setelah kena pajak menjadi $[y = Y - t(z)]$ dan fungsi utilitasnya menjadi $U = u[Y - t(z), z]$. Setiap individu akan memaksimumkan utilitasnya terhadap z sebagai berikut:

$$\frac{dU}{dz} = -u_y t'(z) + u_z = 0$$

$$t'(z) = \frac{dt(z)}{dz} = p/N$$

$$\frac{dU}{dz} = MRS = \frac{u_z}{u_y} = \frac{p}{N}$$

$$N = MRS \cdot P \dots \dots \dots (1)$$

$$\left(\sum MRS = MC = p \right)$$

Penetapan harga pajak (p) dilakukan melalui proses politik yaitu mekanisme *budgeting*. Penggabungan analisis ekonomi dan proses politik ini merupakan solusi terbaik

untuk mencapai alokasi *public good* yang efisien. Prosedur ini tentu saja tidak sempurna karena dalam kenyataan preferensi dan tingkat pendapatan konsumen bervariasi. Alokasi optimum ini berlaku bagi *pure public good*.

Alokasi optimum yang dicapai pada *pure public good* di atas belum menjamin *equity*, karena terdapat konsumsi *private good* yang menimbulkan eksternalitas dan mekanisme pasar tidak dapat menginternalkan eksternalitas tersebut. Di samping itu juga terdapat batasan spasial dari *benefit* dan kemacetan (*congestion*) dalam penyediaan *private good* sehingga memerlukan aturan efisiensi yang berbeda. Barang-barang semacam ini dikategorikan ke dalam *mix good* yang memerlukan ukuran optimal yang lebih kecil dari *pure public good* dalam alokasi dan kelompok konsumennya (*club size*).

Untuk mengetahui solusi optimal dari *mix good* tersebut maka asumsi yang dibangun adalah asumsi-asumsi homogenitas wilayah yaitu (Rustiadi, Saefulhakim dan Panuju, 2010):

1. Lahan (ruang) dalam keadaan *fixed*;
2. Pendapatan dan preferensi identik;
3. Biaya penyediaan *public good* konstan;
4. Pemerintah tidak membedakan pelayanan (*good governance*) dan distribusi pendapatan dalam keadaan *given*;
5. Semua barang ada *pure public good*.

Jika *public good* tersebut adalah z^* dan $z^* = \left(\frac{1}{\alpha}\right)z$, maka fungsi utilitas setelah pendapatan kena pajak adalah $u[Y - t(z^*), z^*]$ dimana $t = \frac{\alpha p z^*}{N}$, sehingga: $\frac{dU}{dz} = \frac{u_{z^*}}{u_y} = \frac{\alpha p}{N} \dots \dots \dots (2)$ dan $MRS = \alpha p/N$ (ukuran fasilitas memenuhi syarat Samuelson). Dari persamaan (1) dan (2) dapat dilihat adanya perbedaan harga pajak antara *pure public good* (z) dan *local public good* (z^*).

Ukuran optimal klub dapat dicapai bila turunan harga pajak minimum. Pada kasus *pure public good*, harga pajak adalah $\frac{p}{N}$ sehingga

$\frac{d(p_N)}{d(N)} = -\frac{p}{N^2}$. Semakin besar populasi (N), turunannya akan mendekati = 0. Implikasinya, semakin besar N, penyediaan *public good* akan semakin murah dan efisien. Sebaliknya pada kasus *local public good* (z^*), di mana harga pajak $p^* = \frac{\alpha p}{N}$, sehingga

$$\frac{dp^*}{dN} = \frac{p}{N} \cdot \frac{\delta \alpha}{\delta N} - \frac{\alpha p}{N^2} = 0$$

$\frac{\delta \alpha}{\delta N} \cdot \frac{N}{\alpha} = r$ adalah elastisitas α terhadap perubahan N.

$$\text{Sehingga: } \frac{dp^*}{dN} = \frac{\alpha p}{N^2} (r - 1) = 0$$

P^* minimum bila $r = 1$. Pada titik tersebut, penurunan p^* dari kelebihan pembagian beban pajak akan diimbangi oleh tambahan harga pajak dari *congestion* melalui fungsi α dan pada saat $r = 1$ ukuran klub mencapai optimum. Apabila N semakin besar akan menyebabkan mahal biaya penyediaan *public good*.

Struktur optimal penyediaan *public good* menggambarkan interaksi antara ukuran optimal *public good* dan ukuran optimal klub. Solusi optimal merupakan perpotongan antara *service* optimal dengan klub optimal penyediaan jasa publik. Modal efisiensi penyediaan *public good* dalam sistem pemerintahan multiunit memerlukan perbedaan dalam ukuran fasilitas dan jangkauan wilayah. Interpretasi dari solusi optimal tersebut adalah penyediaan *pure public good* memerlukan ukuran pemerintah yang besar (nasional) dengan sistem sentralisasi sedangkan untuk *local public good* memerlukan ukuran pemerintah yang lebih kecil (daerah) dengan sistem desentralisasi.

Salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bekasi. Pada perkembangannya, sesuai dengan Perda No. 4/2004, Kota Bekasi mempunyai 12 kecamatan, yang terdiri dari 56 kelurahan, yaitu: Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Pondok Gede,

Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bantar Gebang, kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya dan Kecamatan Pondok Melati. Selain menjadi wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa dan industri (Gambar 1).

Dari sisi permukiman, Kota Bekasi ditinggali oleh lebih dari 2 juta penduduk (BPS Kota Bekasi, 2010). Sementara dari sisi aktivitas perdagangan, jumlah kios, pedagang kaki lima (PKL), los, *counter*, *awning* dan ruko berjumlah masing-masing: 2.757, 1.380, 1.217, 512, 299 dan 19 yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada aktivitas industri, Kota Bekasi diisi oleh aktivitas industri sekunder seperti: industri makanan dan minuman, 49 unit; furnitur 43 unit; pakaian jadi 24 unit; barang dari karet/plastik 21 unit; logam 20 unit; kimia 16 unit; kayu 15 unit; kertas 14 unit, kulit dan alas kaki 13 unit, tekstil 12 unit, kendaraan bermotor 11 unit, penerbitan 9 unit, barang galian non-logam 8 unit, logam dasar 7 unit, daur ulang 3 unit, dan alat angkutan 2 unit (BPS Kota Bekasi, 2006).

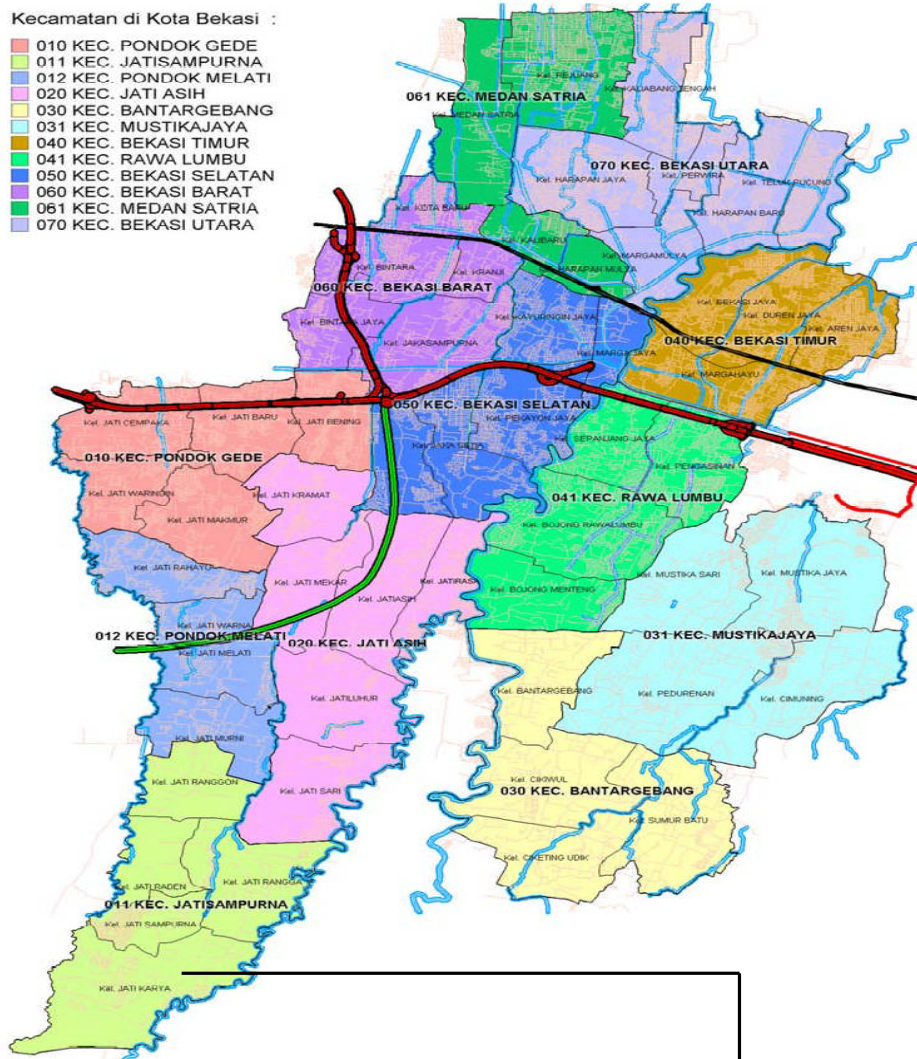
Selain sektor perdagangan, jasa dan industri, di Kota Bekasi terdapat 18 situ/rawa yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Menurut PP. 27/1991 tentang Rawa, situ/rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.

Secara fisik, situ berpotensi: *pertama*, sebagai tempat parkir air saat musim hujan sekaligus resapan air. *Kedua*, tempat berkembangnya keanekaragaman hayati. *Ketiga*, sumber air baku untuk irigasi dan kebutuhan domestik. *Keempat*, pengendali banjir. *Kelima*, pengembangan usaha perikanan skala kecil. *Keenam*, tempat wisata/rekreasi. Di beberapa tempat seperti di Kota Tangerang situ telah dikembangkan menjadi kawasan wisata yang menghasilkan pendapatan bagi daerah (PAD).

PETA KOTA BEKASI / *Map of Bekasi Municipality*

Kecamatan di Kota Bekasi :

- 010 KEC. PONDOK GEDE
- 011 KEC. JATISAMPURNA
- 012 KEC. PONDOK MELATI
- 020 KEC. JATI ASIH
- 030 KEC. BANTARGEBAH
- 031 KEC. MUSTIKAJAYA
- 040 KEC. BEKASI TIMUR
- 041 KEC. RAWA LUMBU
- 050 KEC. BEKASI SELATAN
- 060 KEC. BEKASI BARAT
- 061 KEC. MEDAN SATRIA
- 070 KEC. BEKASI UTARA



Gambar 1. Peta Kota Bekasi dan Lokasi Situ Pulo

Dalam konteks pengembangan pariwisata itu lah situ menjadi salah satu alternatif pengembangan kawasan di wilayah urban. Namun demikian, penentuan kebijakan pengembangan pariwisata situ harus ditempatkan dalam kerangka karakteristik masyarakat setempat. Dalam bahasa tata guna lahan (*land use*), penggunaan lahan, terutama untuk pengembangan pariwisata harus didasarkan pada *core business* masyarakat setempat dan harus mengikuti penggunaan lahan yang ada di sekitarnya (Wahyudin, 2012).

Apalagi saat ini, situ dihadapkan pada sejumlah masalah serius. Di Jakarta misalnya, Kajian Priyautama (2011) menunjukkan, karena tekanan penduduk dan pembangunan, situ cenderung mengalami pengelolaan yang tidak memadai. Dengan kalimat yang lain, prinsip *good governance* belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga mengalami apa yang disebut sebagai "*tragedy of the commons*". *Tragedy of the Commons* sederhananya timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan makhluk hidup lain (Hardin, 1968).

Agar *tragedy of the commons* itu tidak terjadi, maka peran pemerintah harus lebih dominan, khususnya pemerintah daerah. Peran tersebut dapat diwujudkan dalam format membuat regulasi agar keberadaan situ dapat berfungsi ekonomis dan sekaligus ekologis. Pilihan ini tentu tidak mudah. Karena itu, diperlukan sebuah metode yang tepat dalam pengambilan keputusan tersebut.

Salah satu situ yang terdapat di Kota Bekasi adalah Situ Pulo. Situ Pulo berada Desa Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna. Posisinya berada di RT 03 dan RW 09 serta diapit oleh Perumahan PT. Citra Land, Bangunan SD 4 Kampung Pulo dan perumahan penduduk. Jumlah penduduk di sekitar lokasi ini ada sekitar 224 Kepala Keluarga (KK) dan penduduk sekitar 75.000 jiwa, dengan luas areal situ sekitar 4,8 hektar (Gambar 1).

Paralel dengan isu *the tragedy of the commons* tadi, maka pemerintah setempat harus mengambil kebijakan yang tepat dalam upaya mengelola situ tersebut, baik tindakan yang berorientasi ekonomi maupun ekologi. Salah satu teknik pengambilan kebijakan/keputusan dalam situasi yang kompleks adalah dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Teknik AHP telah secara luas digunakan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, baik yang terkait dengan kepentingan publik maupun keputusan perusahaan dalam lingkup mikro. Penelitian Juliansyah (2010) misalnya meneliti keberadaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang Bekasi. Selain Juliansyah, Istiyanto (2009) dalam penelitiannya tentang strategi promosi juga menggunakan teknik AHP.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah mengkaji persepsi dan preferensi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi masyarakat, pihak swasta dan pemerintah terhadap pengembangan Situ Pulo.

METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Jumlah responden (pemangku kepentingan) adalah 5 orang. Distribusi responden tampak dalam tabel di bawah ini. Pengumpulan data primer dilakukan pada tahun 2010. Sementara kompilasi data sekunder dilakukan pada tahun 2011.

Tabel 1. Distribusi Responden

Pemangku Kepentingan	Jumlah Sampel
Dinas Pariwisata	1

Tabel 1. Lanjutan

Bappeda	1
Rukun Tetangga (RT)	2
Rukun Warga (RW)	1

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan AHP. AHP digunakan untuk membandingkan pendapat para pemangku kepentingan tentang manfaat positif dan negatif pengembangan Situ Pulo. Pengembangan diarahkan pada isu situ sebagai obyek wisata. Demi tujuan praktis, digunakan perangkat lunak Expert Choice 2000 untuk analisis data. Secara konseptual, langkah-langkah analisis AHP sebagai berikut:

1. Identifikasi Sistem

Langkah ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa rujukan untuk memperkaya ide atau diskusi dengan beberapa ahli/pakar dalam upaya mendapatkan semua konsep yang relevan dengan permasalahan.

2. Perumusan Hirarki

Dalam penyusunan hirarki atau struktur keputusan dilakukan dengan menggambarkan elemen sistem atau alternatif keputusan dalam abstraksi sistem hirarki keputusan.

3. Komparasi Berpasangan

Dilakukan untuk penentuan tingkat kepentingan pada setiap tingkat hirarki atau penelitian pendapat. Teknik ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden. Responden bisa seorang ahli atau bukan, tetapi terlibat dan mengenal baik permasalahan yang diajukan. Untuk mengkuantitatifkan data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi 1-9. Dalam penyusunan skala kepentingan digunakan patokan berdasarkan Saaty (1993) yaitu:

Tabel 2. Komparasi Berpasangan

Skala	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya.	Dua elemen menyumbang sama besar pada sifat itu.

3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya.	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya.
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting ketimbang elemen yang lainnya.	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen lainnya.
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya.	Satu elemen disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik.
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang elemen yang lainnya.	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara di antara dua pertimbangan yang berdekatan.	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibandingkan dengan i.	

4. Matriks pendapat individu

Formulasi matriks pendapat individu adalah sebagai berikut:

		C_1	C_2		C_n
	C_1	1	A_{12}		A_{1n}
		$1/a_{12}$	1		A_{2n}
$A = (a_{ij}) =$					
					
		...	...	...	...
	C_n	$1/a_{1n}$	$1/a_{2n}$		1

Dalam hal ini $C_1, C_2, \dots, C_n$ adalah set elemen pada satu tingkat keputusan dalam hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi berpasangan membentuk matriks $n \times n$, a_{ij} merupakan nilai matriks pendapat hasil komparasi yang

mencerminkan nilai kepentingan C_i terhadap C_j .

5. Matriks pendapat gabungan

Matriks pendapat gabungan merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio konsistensinya (CR) memenuhi syarat, dengan formula sebagai berikut:

$$\overline{Xg} = \sqrt[n]{\prod_{ij} a_{ij}(k)}$$

Dimana:

$\overline{Xg}$ = rata-rata geometrik

n = jumlah responden

k = penilaian oleh responden $k = 1 \dots n$

6. Pengolahan horizontal

Terdapat empat tahap, yaitu:

a. Perkalian baris (z) dengan rumus:

$$z_i = VE \sqrt[n]{\prod_{ij} a_{ij}} (i, j = 1, 2 \dots n)$$

b. Perhitungan vektor prioritas atau vektor eigen dengan rumus:

$$eVP_i = \sum_{i=1}^n = \sqrt[n]{\prod_{ij} a_{ij}}$$

Dimana eVP_i adalah elemen vector prioritas ke-i

c. Perhitungan nilai Eigen Max dengan rumus:

$$VA = a_{ij} \times VP \text{ dengan } VA = (Va_i)$$

$$VB = \frac{VA}{VP} \text{ dengan } VB = (Vb_i)$$

$$\lambda_{\max} = \frac{\sum VB}{n}$$

d. Perhitungan konsistensi (CI) dengan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

Dimana:

$\lambda_{\max}$ = akar ciri maksimum

n = ukuran matriks

e. Perhitungan konsistensi (CI) dengan

Indeks konsistensi (CI) merupakan matriks acak/random dengan skala penilaian 1-9 dan kebalikannya (invers) sebagai indeks random (RI). Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio konsistensi (CR).

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil. Nilai rasio konsistensi (CR) adalah perbandingan antara indeks konsistensi (CI) dengan indeks acak (RI), di mana nilai-nilai RI telah ditentukan, yaitu: (Marimin, 2004).

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Acak	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,51

7. Pengolahan vertikal

Pengolahan vertikal digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama. Jika NP_{pq} didefinisikan sebagai nilai prioritas pengaruh elemen ke-p pada tingkat ke-q terhadap sasaran utama, maka:

$$NP_{pq} = \sum_{t=1}^s NPH_{pq}(t, q-1) \times NPT_t(q-1)$$

Untuk:

$p = 1, 2, 3 \dots r$

$t = 1, 2, 3 \dots s$

keterangan:

NP_{pq} = nilai prioritas pengaruh elemen ke-p pada tingkat ke-q terhadap sasaran utama.

NPH_{pq} = nilai prioritas elemen ke-p

NPT_t pada tingkat ke-q
= nilai prioritas pengaruh
elemen ke-t pada tingkat q-1

8. Revisi Pendapat

Revisi pendapat dapat dilakukan apabila nilai konsistensi rasio (CR) pendapat cukup tinggi (lebih dari 0,1) dengan mencari deviasi RMS (*rood mean square*) dari baris-baris (a_{ij}) dan perbandingan nilai bobot baris terhadap bobot kolom (w_i/w_j) dan merevisi pendapat pada baris yang mempunyai nilai terbesar, yaitu

$$\lambda \max = \sum_{j=1}^n (a_{ij} - w_i / w_j)$$

Inventarisasi dari faktor-faktor determinan manfaat positif dan negatif pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata di Kota Bekasi dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. Inventarisasi Faktor Determinan

Aspek	Manfaat	Biaya (Kerugian)
Ekonomi	1. Peningkatan pendapatan masyarakat	1. Pendapatan masyarakat berkurang
	2. Peningkatan PAD	2. Peningkatan biaya retribusi
	3. Peluang usaha UKM	3. Biaya administrasi perijinan
Sosial	1. Penyerapan tenaga kerja	1. Pengangguran
	2. Tersedianya arena rekreasi	2. Perubahan pola hidup
	3. Penurunan kriminalitas	3. Peningkatan kriminalitas
Lingkungan	1. Konservasi lingkungan	1. Pencemaran lingkungan
	2. Pencegahan degradasi lingkungan	2. Kerusakan tata ruang
	3. Keindahan dan kenyamanan	3. Peningkatan volume sampah

Inventarisasi pihak yang bertanggung-jawab terhadap manfaat positif dan manfaat

negatif pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata disusun sebagai berikut:

Tabel 4. Inventarisasi Stakeholder

Peran/Aspek	Manfaat	Biaya (Kerugian)
Ekonomi	1. Pemerintah	1. Pemerintah
	2. Swasta	2. Swasta
	3. Masyarakat	3. Masyarakat
Sosial	1. Pemerintah	1. Pemerintah
	2. Swasta	2. Swasta
	3. Masyarakat	3. Masyarakat
Lingkungan	1. Pemerintah	1. Pemerintah
	2. Swasta	2. Swasta
	3. Masyarakat	3. Masyarakat

Manfaat (*benefit*)

1. Manfaat ekonomi

Kriteria dari faktor yang dijabarkan dalam kelompok manfaat ekonomi merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata di Kota Bekasi. Manfaat ekonomi yang terjadi adalah sebagai berikut: (a) peningkatan pendapatan masyarakat; (b) peningkatan PAD; dan (c) peluang usaha UKM.

2. Manfaat sosial

Manfaat sosial dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata di Kota Bekasi memberi dampak sosial berupa: (a) penyerapan tenaga kerja; (b) tersedianya arena rekreasi; dan (c) penurunan kriminalitas.

3. Manfaat lingkungan

Manfaat lingkungan dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata di Kota Bekasi memberi dampak berupa: (a) konservasi lingkungan; (b) pencegahan degradasi lingkungan; dan (c) keindahan dan kenyamanan.

Kerugian (*loss*)

1. Kerugian ekonomi

Kerugian ekonomi yang muncul dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata antara lain: (a) pendapatan

masyarakat berkurang. Kerugian ini terutama diderita oleh sejumlah masyarakat yang melakukan aktivitas memancing, menebar keramba liar dll; (b) peningkatan biaya retribusi; dan (c) biaya administrasi perijinan.

2. Kerugian sosial

Kerugian sosial yang muncul dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata: (a) pengangguran; (b) perubahan pola hidup; dan (c) peningkatan kriminalitas.

3. Kerugian lingkungan

Kerugian lingkungan yang muncul dari pengembangan Situ Pulo sebagai obyek wisata: (a) pencemaran lingkungan; (b) kerusakan tata ruang; dan (c) peningkatan volume sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Positif

Berdasarkan analisis dampak manfaat pengembangan kawasan wisata Situ Pulo, prioritas yang berpengaruh untuk memperoleh manfaat adalah faktor ekonomi (0,661). Kriteria yang menjadi prioritas utama terhadap dampak manfaat pengembangan kawasan wisata Situ Pulo adalah peningkatan PAD (0,260). Dengan berubahnya kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata, tentu hal ini akan memberikan kontribusi terhadap PAD Pemerintah Kota Bekasi. Sumber-sumber PAD dapat bersumber dari tarif parkir, retribusi, uang sewa lapak, pajak dan lain sebagainya.

Dampak manfaat sosial yang terbesar tersedianya arena rekreasi (0,493) yang diikuti oleh penurunan kriminalitas (0,311) dan penyerapan tenaga kerja (0,196). Penyediaan arena rekreasi merupakan tujuan utama diubahnya kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata. Diharapkan, dengan adanya arena rekreasi ini, masyarakat setempat memperoleh media yang dapat memberikan suasana

nyaman dan asri pada lingkungan sekitar. Namun demikian, kawasan wisata belum bisa diharapkan menjadi kontributor dalam pengurangan angka pengangguran di Kota Bekasi.

Dampak lainnya selain dari dampak ekonomi dan sosial adalah dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak terbesar dari pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata adalah dampak terhadap pencegahan degradasi lingkungan (0,500). Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan karena ditekan oleh aktivitas manusia, baik aktivitas sosial, budaya maupun ekonomi.

Selain itu, degradasi lingkungan juga terjadi karena adanya perubahan pola penggunaan lahan yang intensif, khususnya perubahan tata guna lahan menjadi area perumahan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata dipandang dapat mencegah degradasi lingkungan. Dampak yang secara bersamaan memiliki nilai yang sama adalah konservasi lingkungan (0,250) dan keindahan serta kenyamanan.

Berdasarkan hasil dari bobot pendapat gabungan responden perumus kebijakan menunjukkan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat dampak positif pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi (0,335).

Negara memiliki tiga pilar utama, yaitu pemerintah (*state*), swasta/pelaku usaha (*private sector*) dan masyarakat (*society*). Pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Swasta/pelaku usaha lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi yang berorientasi profit. Sedangkan masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah dan swasta/pelaku usaha. Terjadi interaksi antara ketiga pilar tersebut. Dari hasil AHP menunjukkan, pemerintah ditempatkan

sebagai penanggungjawab yang memperoleh dampak positif dari pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata. Namun demikian, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakannya di level implementasi.

2. Dampak Negatif

Faktor yang paling berpengaruh dari dampak negatif pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi kawasan wisata adalah faktor ekonomi (0,493). Dalam aspek ekonomi, kriteria komponen dampak yang paling dirasakan menurut pendapat gabungan responden ahli adalah peningkatan biaya retribusi (0,637). Peningkatan biaya retribusi merupakan implikasi logis dari pengembangan suatu wilayah. Sebab penerapan retribusi (yang merupakan bagian dari pajak) juga bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan suatu wilayah. Peningkatan retribusi ini akan dikembalikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan kembali kawasan wisata Situ Pulo menjadi lebih baik lagi.

Adapun dampak negatif aspek sosial menurut pendapat responden ahli adalah perubahan pola hidup (0,413). Perubahan pola hidup ini tentu terkait dengan berubahnya tatanan wilayah sekitar situ. Intensitas kegiatan ekonomi dan sosial di sekitar kawasan situ akan mengubah pola hidup masyarakat setempat, baik dari segi konsumsi (ekonomi) maupun sikap dan perilaku penerimaan diri terhadap masyarakat luar (budaya).

Aspek terakhir yang menimbulkan dampak negatif adalah lingkungan. Bobot tertinggi dari pendapat responden ahli adalah pada peningkatan volume sampah (0,327). Hal ini muncul sebagai dampak dari berubahnya kawasan situ dan pola hidup masyarakat setempat. Dengan adanya lapak-lapak UKM, arena parkir, dan sarana lainnya tentu menimbulkan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil dari bobot pendapatan gabungan responden perumus kebijakan menunjukkan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bertanggung jawab dalam dampak negatif dari pengembangan kawasan Situ Pulo menjadi obyek wisata adalah pemerintah (0,491), diikuti swasta (0,233) dan terakhir masyarakat (0,116).

KESIMPULAN

Pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengembangan kawasan wisata Situ Pulo adalah Pemerintah Kota Bekasi. Melihat fakta ini, maka Pemerintah Kota Bekasi harus dapat melakukan inisiatif pengembangan. Meski demikian, proses pembangunan kawasan wisata ini harus berangkat dari aspirasi masyarakat lokal setempat (*bottom-up*). Lebih dari itu, agar lebih menguntungkan, sedapat mungkin pengembangan kawasan wisata Situ Pulo melibatkan pihak swasta dalam bentuk kemitraan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijowijoto, R.,N., 2003, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hardin, G., 1968, *The Tragedy of Commons*, *Science*, Vol. 162, 13 Desember 1968, http://homes.chass.utoronto.ca/~mturner/ec313/readings/Hardin_Science_1968.pdf, diakses 29 Januari 2013
- Istiyanto, E., 2009, *Pengambilan Keputusan dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process dalam Penyusunan Strategi Promosi pada CV. Gintera*, Skripsi, Program Manajemen Penyelenggaraan Khusus, Dept. Manajemen FEM IPB, <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/12014/H09eis.pdf?sequence=2>, diakses 28 Februari 2013

- Juanda, B., 2007, Manfaat dan Biaya Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN, *Jurnal Ekonomi*, Vol. XXV, Edisi Oktober 2007
- Juliansyah, M.H., 2010, *Analisis Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (PTST) Bantar Gebang Bekasi*, Tesis, Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, <http://lontar.ui.ac.id>, diakses 29 Januari 2013
- Marimin, 2004, *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*, Grasindo, Jakarta
- Priyautama, I.P., 2011, *Masalah Pengelolaan Situ di Wilayah DKI Jakarta: Suatu Kajian Kelembagaan*, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56873>, diakses 01 Maret 2013
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D.R., 2010, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Saaty, T, 1993, *Pengambilan Keputusan (Bagi Para Pemimpin)*, PT Grasindo, Jakarta
- Wahyudin, Y., 2012, Kajian Kebijakan Nilai Fiskal Lahan, *Jurnal Ilmiah Wawasan Tridharma*, I, 2012

